

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Ayinun^{1*}, Ihyani Malik², Haerana³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Healthy Living Community Movement Program in Masalle District, Enrekang Regency, which is a form of research that aims to provide an overview as a kind of data collected from the field objectively with a qualitative descriptive type. Data collection techniques used are observation, interviews with a number of informants. Data analysis using interactive analysis model. The results showed that the implementation of the GERMAS program in setting targets or targets was right on target, which was intended for the community in Masalle District. The socialization of the program is carried out by the implementing team at locations that have been determined for the GERMAS program to carry out socialization in each of the targeted Villages/Sub-districts so that the Puskesmas in collaboration with officials in the Masalle sub-district can convey the aims and objectives of this program to the community. The GERMAS program is in line with its goal of increasing awareness, willingness and ability of the community to behave in a healthy manner in an effort to improve the quality of life.

Keywords: *program implementation, public policy, gernas*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GERMAS dalam menetapkan target atau sasaran sudah tepat sasaran yaitu diperuntukan kepada masyarakat di Kecamatan Masalle. Sosialisasi program dilaksanakan oleh tim pelaksana di lokasi yang sudah ditentukan untuk diadakannya Program Gernas melakukan sosialisasi di setiap Desa/Kecamatan yang dituju agar dari pihak Puskesmas yang bekerja sama dengan aparat di Kecamatan Masalle dapat menyampaikan maksud dan tujuan program ini ke masyarakat. Program GERMAS sudah sesuai dengan tujuannya yaitu Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

Kata kunci: implementasi program, kebijakan publik, gernas

* ayinun@gmail.com

PENDAHULUAN

Hidup sehat merupakan suatu hal yang seharusnya memang diterapkan oleh setiap orang, mengingat manfaat kesehatan yang sangat penting bagi setiap manusia, mulai dari konsentrasi dalam bekerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari tentu memerlukan kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan anak serta keluarga untuk mencapai keharmonisan keluarga. Menciptakan hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah serta murah di bandingkan biaya yang harus kita keluarkan untuk pengobatan apabila mengalami gangguan kesehatan. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi sudah mengidap penyakit baru mengobati sehingga akan membuat kerugian tersendiri bagi yang mengalaminya.

Gerakan ini perlu diungkapkan sebagai salah satu perwujudan dari revolusi mental yang dicanangkan oleh presiden, oleh karenanya perlu disusun panduan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang jadikan acuan pimpinan daerah daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mengawali dan melaksanakan program GERMAS di lingkungan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan data Riskesdas 2018, ada sejumlah faktor resiko

perilaku kesehatan yang terjadi di Indonesia yakni: penduduk kurang aktivitas fisik (33,5%), perilaku merokok penduduk sejak usia dini (28,8%), penduduk >10 tahun kurang konsumsi sayuran dan buah (95,5%), penduduk >10 minum minuman beralkohol (3,3%).

Dengan adanya Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS) di Kecamatan Masalle diharapkan mampu merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat juga mampu menurunkan angka PTM (penyakit tidak menular) di setiap tahunnya. Kesuksesan GERMAS tidak hanya bisa mengandalkan para sektor kesehatan saja. Peran kementerian dan lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan di tunjang peran serta seluruh masyarakat. Memperaktekkan pola hidup sehat mulai dari individu, keluarga dan masyarakat serta pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Upaya pencegahan penyakit melalui Gerakan Hidup Sehat (GERMAS) diperlukan agar dapat diterapkan perilaku hidup sehat oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun sasaran

prioritas GERMAS, yakni tenaga kesehatan, para pengambilan kebijakan, institusi, dan masyarakat. Sedangkan pelakunya adalah seluruh komponen bangsa.

Kecamatan Masalle adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 696.096 jiwa. Pada kecamatan ini masalah kesehatan masyarakat masih menjadi masalah yang harus di benahi dikarenakan aspek penting dalam pembangunan kesejakteraan masyarakat. Seiring dengan masalah tersebut pemerintah setempat telah menjalankan dan merencanakan program GERMAS di Kecamatan Masalle, namun yang menjadi masalah GERMAS sendiri masih belum diketahui secara luas dan jelas oleh masyarakat, sehingga program ini belum berjalan efektif di Kecamatan Masalle yang terkadang menyebabkan penyakit yang di karenakan perilaku kesehatan masyarakat yang kurang baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Masalle menunjukkan bahwa hanya sebagian orang yang sudah melakukan pola hidup sehat sedangkan ada yang belum menjalankan gerakan hidup sehat, jarang mengkonsumsi buah dan sayur, tidak melakukan aktivitas fisik

dan tidak memeriksa kesehatan secara rutin. Pada Kecamatan Masalle masih ada desa yang belum ODF (*Open Defecation Free*) atau stop BABS dimana hal ini menitik beratkan pada kesadaran masyarakat untuk tidak lagi buang air besar sembarangan. Selain itu dari segi cuci tangan memakai sabun masih ditemukan masyarakat yang membiasakan mencuci tangan pakai sabun sesudah dan sebelum melakukan aktivitas, kemudian dari segi penyediaan air bersih, dari segi kuantitas jumlah penyediaan air bersih sudah tercukupi tetapi pada saat musim kemarau masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena belum terdapat akses air PDAM masyarakat hanya menggunakan air dari sumber mata air atau air pegunungan. Lalu pada program PHBS lingkup kebiasaan merokok masyarakat di Kecamatan Masalle masih banyak yang mempunyai kebiasaan merokok didalam rumah. Beberapa masalah ini timbul dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang maksud dan tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kurangnya informasi dari petugas kesehatan yang mengakibatkan masyarakat tidak secara jelas mengetahui cara melakukan hidup sehat secara baik dan benar. Selain itu

kurangnya reaksi positif dari masyarakat dalam mencari tahu informasi tentang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya ialah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Wijaya dan Supardo (dalam Pasolong, 2017: 67) mengatakan bahwa implementasi merupakan mentransformasikan sesuatu rencana kedalam aplikasi. Orang yang kerap berpikiran kalau implementasi cuma ialah penerapan apa yang sudah diputuskan legislatif ataupun para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Hendak

namun dalam realitas bisa dilihat sendiri meskipun rencana sudah dibuat sebaik mungkin namun tidak terdapat manfaatnya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik serta benar. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari bermacam kegiatan guna menggapai sesuatu tujuan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan

perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan publik. 1) Keberhasilan Implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan Implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal yaitu: Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Tujuan kebijakan tercapai yang meliputi dampak atau

efeknya pada masyarakat secara individu maupun kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran. 2) Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas: a. Isi kebijakan (*content of Policy*) mencakup: 1) Kepentingan yang mempengaruhi: berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut; 2) Tipe manfaat: pada poin ini *content of policy* berupa untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan; 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai: setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas; 4) Letak pengambilan keputusan: pengambilan

keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat; 5) Pelaksana program: dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan sudah harus terparar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; 6) Sumber daya yang digunakan: apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik. b. Lingkungan Implementasi (*concect of implementation*) mencakup: 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta srategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh

hasilnya dari yang diharapkan. 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteritik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi merupakan membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal: 1)

Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

Menurut Mazmanian dan Sebateir (Tahir, 2014:78), menjelaskan “Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah; 2) Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan; 3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenaan dengan indikator, kondisi

sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegarannya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Program adalah tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai;
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang diambil dalam mencapai tujuan itu; c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan; e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).

Selanjutnya Keban (2004: 35), menyebutkan: Apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Gunakan mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut *input* kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Kertonegoro (2004: 17), menyebutnya: Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan Germas, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja namun juga peran serta kementerian dan lembaga di berbagai sektor lain (Buku Panduan GERMAS, 2017).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif Tipe penelitian fenomenologis ini adalah studi tentang

pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu juga tipe penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial atau fakta sosia yang menjadi masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implemtasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implemetasinya, dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan, dijelaskan juga bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas, Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan pelaksanaan program sesuai, Dalam menjalankan suatu kebijakan atau

program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan, sebuah program didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik. Hal ini sesuai teori Menurut Nurdin Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Program Germas di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang salah satu contoh kebijakan yang di ambil oleh Pengelolah Program Promkes sebagai pengambil keputusan, namun dalam ini belum maksimal seperti pada point perubahan nyata karena dikatakan belum maksimal program ini karena kurang nya partisipan masyarakat yang datang dan ikut aktif dalam program ini.

Lingkungan Implementasi (*Concext of Implementation*)

Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan aktor yang terlibat. indikator ini beragumen bahwa dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta srategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya

pelaksanaan suatu Implementasi kebijakan. bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari hasinya yang sesuai dengan yang diharapkan dan sama halnya dengan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteritik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kepatuhan dan daya tanggap dari masyarakat. Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Hala ini sesuai dengan teori menurut Kertonegoro (2004: 17), menyebutnya: Empat (4) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Implementasi Program Germas di Kecamatan Masalle dalam konteks kekuasaan di Puskesmas Masalle Sebagai inisiator untuk memberikan ide dalam pembuatan pembuatan kebijakan dibidang kesehatan, sedangkan untuk

kepentingan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena terkendala covid-19 segala aktivitas untuk turun langsung di lapangan. Karakteristik lembaga penguasa Puskesmas sebagai pelaksana program ini cukup tanggap. Karena telah mempersiapkan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Masalle. Namun kepatuhan dan daya tanggap dari kelompok sasaran dari gerakan masyarakat hidup masih kurang kepatuhannya.

Adapun penjelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam Implementasi Program Gerakan Masyarakat Sehat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

Isi kebijakan (*Content of Policy*)

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu Implementasi kebijakan. Dengan adanya Germas yang bertujuan untuk menurunkan prevelensi menular dan penyait tidak menular serta dampak ditimbulkan berupa kematian maupun

kecacatan, mengantisipasi terjadinya penurunan produktivitas masyarakat karena permasalahan kesehatan dan mengurangi beban finansial masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Dalam pelaksanaan Program Germas di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang diadakan aktivitas fisik seperti senam setiap hari Jumat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara melakukan pola hidup sehat.

Bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Masalle adalah mengontrol pola hidup masyarakat yang kurang sehat dengan memilih makanan yang sehat dan mengubah perilaku hidup masyarakat untuk mengomsumsi buah dan sayur serta melakukan aktivitas fisik.

Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Masalle memiliki target yang ingin dicapai yaitu masyarakat diharapkan mengomsumsi buah dan sayur serta melakukan aktivitas fisik setiap hari. Melalui sosialisasi yang

diberikan oleh Puskesmas Masalle untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat. Seperti makan buah dan sayur serta memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Program Germas di Kecamatan Masalle belum maksimal karena program melakukan aktivitas fisik seperti makan buah setelah beraktivitas fisik tiap hari jumat hanya terlaksana sekali saja.

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Yang menjadi pelaksana program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Masalle pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang membuat kebijakan yang berwawasan kesehatan, mensosialisasikan ke jajarannya sekaligus melaksanakannya. Sedangkan masyarakat menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan perilaku hidup sehat.

Sebuah program didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik.

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Masalle belum maksimal baik dari segi Sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Lingkungan Implementasi (*Concext of Implementation*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu Implementasi kebijakan. Strategi yang dilakukan dalam implementasi program Germas di Kecamatan Masalle juga akan menentukan keberhasilan suatu program seperti dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang cara menerapkan pola hidup sehat namun terkendala covid 19 sehingga pihak puskesmas tidak bisa turun kelapangan secara langsung untuk mensosialisasikan program Germas.

Karakteritik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Perlu adanya Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah dan pihak puskesmas

partisipatif untuk menyiapkan agenda demi tercapainya tujuan program Germas dengan berkolaborasi dengan seluruh elemen di tengah masyarakat.

Pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana program. Di dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Masalle tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran masih tidak cukup kepatuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, program Germas pada pelaksanaannya dalam menentukan target sasaran pelayanan ini mengacu masyarakat yang pada saat dilaksanakan hanya beberapa masyarakat yang hadir dikarenakan banyak dari masyarakat yang lebih memilih untuk pergi ke lahan perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari informan terkait indikator lingkungan implementasi bahwa dalam menetapkan target atau sasaran dalam melaksanakan program germas tidak terlepas dari bantuan aparatur Desa/Kecamatan sebagai pemegang kekuasaan hal ini juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karena, sudah adanya pemangku kekuasaan yang siap untuk dilikuti arahan dan menjadi bahan pertimbangan sehingga pihak

puskesmas sudah tidak kewalahan menemui masyarakat yang harus mendapatkan program germas. Germas ini adalah cara untuk meningkatkan efisiensi efektivitas daya hidup sehat masyarakat Kecamatan Masalle. Dan untuk menentukan target/sasaran dalam program Germas ini semuanya sudah siap.

KESIMPULAN

Isi kebijakan (*content of Policy*), yaitu a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, dalam mempengaruhi kepentingan-kepentingan pelaksanaan Program Germas di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sudah berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya seperti melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur. b. Tipe manfaat, manfaat dari adanya Program Germas di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang mengajak masyarakat Masalle untuk menjaga pola hidup sehat seperti membiasakan diri mencuci tangan setelah beraktivitas dan mengonsumsi sayur dan buah. c. Derajat perubahan yang diinginkan, dalam pengimplementasian Germas di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang belum maksimal karena dalam pelaksanaannya setiap seperti kegiatan aktivitas fisik hanya beberapa masyarakat yang terlibat. d. Letak

pengambilan keputusan, implementasi program Germas di Kecamatan Masalle pada letak pengambilan keputusan belum terlaksana maksimal karena dalam menjalankan program Germas di Kecamatan Masalle yaitu melakukan aktivitas fisik hanya dilakukan sekali sebulan. e. Pelaksana program, Dalam pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan. f. Sumber Daya yang Digunakan, sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan germas di kecamatan Masalle belum memadai namun sudah berjalan.

Lingkungan Implementasi (*concect of implementation*), yaitu a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Strategi program Germas di Kecamatan Masalle bekerja sama dengan pihak Puskesmas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya prlaksanaan perilaku hidup sehat. b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, pelaksanaan Program Germas di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sangat memberikan manfaat bagi masyarakat Masalle. Dalam program yang terencana dan mengajak masyarakat

untuk bekerja sama untuk menyadari pentingnya perilaku hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup. c. Tingkat kepatuhan dan Adanya Respon dari pelaksana, tingkat kepatuhan dan respon masyarakat dari adanya program Germas di Kecamatan Masalle belum maksimal karena dalam pelaksanaan dan pola hidup sehat tidak sesuai seperti adanya masyarakat yang sesuai dengan pola hidup sehat.

REFERENSI

- Ariyanti, R. O., Mardianto, M., & Khairunnisyah, T. (2019). *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Wilayah Kerja Puskesmas Batumarta Viii Kabupaten Oku Timur* (Skripsi, Universitas Sriwijaya) Diambil dari: <https://repository.unsri.ac.id/28045/>
- Cahyani, D. I. Kartasurya, M . I., & Rahfiludin, M. Z. (2020). Gerakan Hidup Sehat Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), pp.10-18.
- Dinas Kesehatan Purworejo. (2018). Kampanye Germas Tingkat Kabupaten. Dinas Kesehatan Purworejo. Diakses tanggal 20 September 2018.
- Depkes RI. (2016). Germas Wujudkan Indonesia Sehat. Depkes RI: Diakses tanggal 15 November 2016 pukul 00.00 WIB.
- Izzati, W., & Bestari, D. O. (2020). *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E-ISSN: 2622-2256 Hubungan Sikap Dan Motivasi*

- Dengan Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Keluarga Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E-ISSN: 2622-2256. 3(2), pp. 12–18.*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Presiden, G. M. H. S. (2017). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Presiden*. 111.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Buku Panduan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Maryunani, A. 2013. *Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih*. Jakarta: CV. Trans Informedia.
- Arif, M. I., & Pertiwi, A. (2021). Evaluasi Program PHBS di Desa Masalle Kabupaten Enrekang. *Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika Dan Masyarakat 21(2)*.
- Ningrum, R. W. (2008). Wujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan GERMAS melalui Perbaikan Gizi. *OSF Preprint*, pp. 5-26.
- Nurrohmah, M. (2021). Program Peningkatan Aktivitas Fisik Sebagai Wujud Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Untuk Mencegah Penyakit PTM. *OSF Preprint*.
- Nursalamah, M., Giyanto, B., & Sutrisno, E. (2021). Analisis Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Lebak. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik, 3(2)*.
- Sri Susilawati dkk. (2021). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Kader Posyandu di Wilayah Puskemas Cibeureum. *Jurnal Abdimas PHB, 4(1) Januari*.
- Pangalila, Y., Kaawoan, J., & Kumayas, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. *JURNAL EKSEKUTIF, 3(3)*.
- PerBup Enrekang No 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
- Winangsih, R., & Nisa, H. (2020). Strategi Komunikasi Dinas Kesehatan Kota Serang Mengenai Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). *Journal of Scientific Communication (JSC), 1(1)*.